

DIPLOMASI DAN NEGOSIASI KOREA SELATAN TERHADAP ISU COMFORT WOMEN PADA ERA MOON JAE-IN

Zahra Ramadhani Fitria¹⁾, Harmonis²⁾

Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan

Correspondence

Email: Zahra.ramadhani46@icloud.com

No. Telp:

Submitted: 9 Januari 2024

Accepted: 11 Januari 2024

Published: 22 Januari 2024

ABSTRACT

South Korea's diplomacy and negotiations on the issue of Comfort Women (women who were victims of sexual slavery during World War II) during Moon Jae-in's rule. The issue has been a source of conflict between South Korea and Japan, and Moon Jae-in's administration is considered a pivotal period in finding a solution through a diplomatic approach. Using a qualitative analysis approach, the authors examine the Moon Jae-in government's policy on the issue, diplomatic relations with Japan, and the negotiation process involved. The results of this study reveal the positive impacts and challenges that are still faced, taking into account public response and public opinion. The journal's conclusions cover South Korea's diplomatic achievements, the challenges it faces, and its implications for international relations, while providing recommendations for future research, including the potential role of civil society in resolving Comfort Women issues.

Keyword : Diplomacy, Negotiations, South Korea, Comfort Women, Moon Jae-In Era

ABSTRAK

Diplomasi dan negosiasi Korea Selatan dalam menangani isu Comfort Women (wanita yang menjadi korban perbudakan seksual selama Perang Dunia II) selama pemerintahan Moon Jae-in. Isu tersebut telah menjadi sumber konflik antara Korea Selatan dan Jepang, dan pemerintahan Moon Jae-in dianggap sebagai periode penting dalam mencari solusi melalui pendekatan diplomatik. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, penulis meneliti kebijakan pemerintah Moon Jae-in terhadap isu tersebut, hubungan diplomatik dengan Jepang, serta proses negosiasi yang terlibat. Hasil penelitian ini mengungkap dampak positif dan tantangan yang masih dihadapi, dengan mempertimbangkan respons masyarakat dan opini publik. Kesimpulan jurnal ini mencakup pencapaian diplomasi Korea Selatan, tantangan yang dihadapi, dan implikasinya terhadap hubungan internasional, sambil memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, termasuk peran potensial masyarakat sipil dalam penyelesaian isu Comfort Women.

Kata Kunci : Diplomasi, Negosiasi, Korea Selatan, Comfort Women, Era Moon Jae-In

PENDAHULUAN**Latar Belakang Isu Comfort Women**

Isu Comfort Women (wanita yang menjadi korban perbudakan seksual) bermula dari periode Perang Dunia II ketika Kekaisaran Jepang menduduki dan menguasai sejumlah wilayah di Asia Timur, termasuk Korea. Selama pendudukan tersebut, Kekaisaran Jepang mendirikan sistem "Troops Comfort" atau "Jugun Ianfu" yang bertujuan menyediakan layanan



seksual bagi tentara Jepang yang bertugas. Wanita-wanita yang terlibat dalam sistem ini dikenal sebagai "Comfort Women."

Sistem Comfort Women ini memiliki perbedaan dengan perempuan pekerja seks dalam sistem prostitusi di mana kedua istilah tersebut dibedakan dari adanya 3 unsur, yakni berdasarkan transaksi, *promiskuitas* dan ketidakacuhan emosional. Dalam sistem prostitusi menunjukkan adanya hubungan seksual yang dilakukan hanya sesaat tanpa adanya peraturan yang mengikat atau dapat dilakukan dengan siapa saja, sedangkan sistem Comfort Women hanya memperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan orang Jepang.

Faktanya, sebagian besar Comfort Women adalah warga negara Korea yang dipaksa atau direkrut dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Mereka sering kali diperdagangkan atau diculik, dan banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, pemerkosaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Isu ini menjadi salah satu episode paling tragis dan kontroversial dalam sejarah hubungan antara Korea dan Jepang. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, isu Comfort Women menjadi pusat perdebatan antara Korea Selatan dan Jepang. Kesulitan mencapai kesepakatan penyelesaian terkait kompensasi dan permintaan maaf dari pihak Jepang kepada korban serta ketidaksepakatan tentang cara mengenang sejarah ini telah menyebabkan ketegangan yang berlarut-larut antara kedua negara.

Latar belakang ini memberikan pemahaman tentang kompleksitas sejarah isu Comfort Women dan menjadi dasar bagi upaya-upaya diplomatik dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Selatan, terutama pada era pemerintahan Moon Jae-in, untuk mencari penyelesaian yang adil dan bermartabat terhadap isu yang sangat sensitif ini.

Signifikansi Diplomasi dan Negosiasi dalam Penyelesaian Isu

1. Menyelesaikan Konflik Sejarah

Diplomasi dan negosiasi memainkan peran kunci dalam menangani konflik sejarah terkait isu Comfort Women antara Korea Selatan dan Jepang. Melalui dialog diplomatik, negara-negara dapat mencari pemahaman bersama mengenai peristiwa masa lalu dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

2. Rehabilitasi Korban

Upaya diplomasi dapat diarahkan untuk memastikan bahwa korban Comfort Women mendapatkan pengakuan, keadilan, dan kompensasi yang pantas atas penderitaan yang



mereka alami. Negosiasi dapat mencakup persetujuan terkait kompensasi finansial, dukungan kesehatan, dan bentuk rehabilitasi lainnya bagi para korban.

3. Penghormatan Terhadap HAM

Diplomasi dan negosiasi dapat membantu menciptakan kesepakatan yang memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan melibatkan keterbukaan mengenai sejarah yang sebenarnya. Hal ini penting untuk mencegah pengulangan kebijakan dan tindakan yang melanggar HAM di masa depan.

4. Pemulihan Hubungan Bilateral

Penyelesaian isu Comfort Women dapat menjadi langkah kunci dalam membangun kembali hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang. Diplomasi yang berhasil dan kesepakatan yang adil dapat menciptakan landasan yang lebih stabil untuk kerjasama dan persahabatan di masa depan.

5. Pengaruh terhadap Opini Publik

Diplomasi juga dapat memengaruhi opini publik di kedua negara. Kesepakatan yang diperoleh melalui negosiasi dapat menciptakan persepsi positif terhadap pemimpin dan hubungan bilateral, sementara kegagalan dalam menyelesaikan isu ini dapat memicu ketegangan dan ketidakpuasan di antara masyarakat.

6. Pengaruh terhadap Keamanan dan Stabilitas Regional

Penyelesaian isu Comfort Women tidak hanya penting untuk kedua negara terlibat, tetapi juga memiliki dampak pada keamanan dan stabilitas regional. Kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang merupakan faktor kunci dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Timur.

7. Pentingnya Diplomasi Multilateral

Isu Comfort Women juga dapat menjadi alasan bagi negara-negara lain dan lembaga internasional untuk terlibat dalam mendukung proses diplomasi. Keterlibatan pihak ketiga atau lembaga internasional dapat membantu memfasilitasi dialog dan menciptakan mekanisme penyelesaian yang adil.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Isu Comfort Women

Comfort Women atau juga disebut sebagai Jugun Ianfu dalam Bahasa Jepang, *Ilbonkun Wianbu* dalam bahasa Korea merupakan para wanita yang direkrut secara paksa untuk menjadi



budak seksual militer Jepang (Tanaka, 2018:1228–1229). Isu Comfort Women dimulai sejak Perang Dunia Kedua, utamanya ketika Jepang banyak menaklukan wilayah negara-negara di Asia. Jepang mulai melakukan intervensi politik domestik Korea sejak tahun 1868, sedangkan intervensi politik luar negeri Korea pada tahun 1904. Jepang juga melakukan perang Cina-Jepang (Sino-Japanese War 1804) dan Russia-Jepang (Russo-Japan War 1905) untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan di Korea (Tanaka, 2018: 72). Atas kemenangan Jepang terhadap dua perang tersebut, pada tahun 1910 kedaulatan Korea jatuh di tangan Jepang sebagai koloni, melalui *Japan-Korea Annexation Treaty* (Tanaka, 2002: 33–34). Jepang menjajah Korea sejak tahun 1910 hingga 1945, sehingga jumlah Comfort Women yang berasal dari Korea mencapai 80% dari seluruh jumlah Comfort Women yang ada. Diperkirakan korban Comfort Women yang berasal dari Korea mencapai 200.000 jiwa (Min, P. G., 2003: 938).

Seorang wakil kepala staff militer Jepang yang bernama Okamura Teiji, medirikan rumah bordil atau disebut juga Comfort Stations pertama kali di Shanghai pada tahun 1932 dengan bertujuan untuk mengalihkan isu pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang (Tanaka, 2018: 94). Pendirian tersebut diminta atas komando jendral militer angkatan laut Jepang bernama Shirakawa Yoshinori (Tanaka, 2002: 20). Comfort Stations juga dijadikan sebagai tempat perekrutan para wanita untuk bekerja di rumah bordil tersebut. Setelah Shanghai, Jepang juga mendirikan Comfort Stations di negara jajahan Jepang lainnya seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Jepang, Korea, Taiwan (Min, P. G., 2003: 938–957). Keseluruhan jumlah Comfort Stations mencapai 400 stations, yang tersebar di Cina Utara sebanyak 100 stations, Cina Selatan 40 stations, Asia Tenggara sebanyak 100 stations, 10 stations di negara kepulauan pasifik seperti Vanuatu, Fiji, Tuvalu, Tonga, dan 10 station di Sakhalin Selatan (Tanaka, 2002: 27). Keadaan Comfort Women di Comfort Station sangat menyedihkan. Para comfort women, di periksa setiap seminggu sekali untuk mengetahui apakah terdapat penyakit kelamin menular (Qiu et al., 2013: 24). Dalam sehari, Comfort Women harus melayani para tentara Jepang sebanyak dua puluh kali hingga tiga puluh kali sehari, sehingga menyebabkan memar dan infeksi pada bagian kelamin korban. Para Comfort Women juga mendapat pemukulan, pembakaran, penyiksaan dan penusukan. Beberapa wanita meninggal di Comfort Stations yang dikarenakan adanya penyakit kelamin, melakukan percobaan bunuh diri dan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Banyak korban yang berusaha untuk melarikan diri, melakukan upaya bunuh diri bahkan hingga ada yang harus dimasukan ke rumah sakit kejiwaan (Min, P. G., 2003: 941).



Pendekatan Diplomatik dalam Penyelesaian Konflik Internasional

Pendekatan diplomatik merupakan suatu strategi yang digunakan oleh negara atau entitas dalam menangani konflik internasional dengan mengedepankan dialog, diplomasi, dan negosiasi daripada tindakan militer atau kekerasan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai, adil, dan berkelanjutan terhadap konflik. Prinsip umum yang mendasari pendekatan diplomatik dalam penyelesaian konflik internasional antara lain dialog dan diplomasi, hormat terhadap kedaulatan HAM, komitmen terhadap solusi damai, keterlibatan pihak ketiga, kerjasama internasional, ketelitian dalam perjanjian dan kesepakatan, responsive terhadap dinamika perubahan, dan komunikasi publik (Willa W, 2023).

METODOLOGI

Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif studi literatur. Adapun penelitian kualitatif adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses berfikir induksi yang berkaitan dengan hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan lingkup ilmiah. Jenis metode penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari objek yang diamati. Metode penelitian yang digunakan berfokus pada pencarian data melalui berbagai sumber seperti jurnal, artikel, e-book, laman web, maupun berita atau media elektronik yang berbasis web. Data tersebut yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk dibahas dan diambil kesimpulannya.

PEMBAHASAN

Peran Diplomasi dalam Era Moon Jae-in

Kebijakan Pemerintah Moon Jae-in terhadap Isu Comfort Women

Pemerintahan Moon Jae-in di Korea Selatan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu Comfort Women dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Moon Jae-in menegaskan pengakuan terhadap penderitaan Comfort Women dan secara terbuka menyatakan permintaan maaf atas kebijakan Jepang yang melibatkan wanita-wanita Korea



sebagai Comfort Women selama Perang Dunia II. Pengakuan ini menciptakan dasar untuk pembicaraan lebih lanjut dengan Jepang. Pemerintahan Moon Jae-in meninjau kembali perjanjian bilateral antara Korea Selatan dan Jepang yang ditandatangani pada tahun 2015. Perjanjian tersebut mendapat kritik karena dianggap tidak memadai dalam menangani isu Comfort Women, dan pemerintah Moon Jae-in menyatakan niat untuk merundingkan kembali kesepakatan tersebut, berupaya untuk melanjutkan perundingan dengan pemerintah Jepang guna mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan terkait isu Comfort Women, meskipun terdapat hambatan dan ketegangan, upaya diplomatik terus dilakukan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pemerintah Moon Jae-in berkomitmen untuk meningkatkan dukungan kesejahteraan bagi para korban Comfort Women. Ini mencakup pelayanan kesehatan, dukungan psikologis, dan bantuan finansial untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan perawatan dan penghargaan yang seharusnya. Pemerintah Korea Selatan di bawah kepemimpinan Moon Jae-in juga mencoba memobilisasi dukungan internasional untuk mendukung tuntutan mereka terhadap Jepang dalam menangani isu Comfort Women. Diplomasi multilateral digunakan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat internasional, mendukung peran masyarakat sipil dalam mengatasi isu Comfort Women. Dukungan dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan aktivis hak asasi manusia diarahkan untuk memberikan suara kepada para korban dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhitungkan perspektif mereka. Pemerintahan Moon Jae-in juga menekankan pentingnya dimensi moral dan etika dalam menangani isu Comfort Women. Ini mencakup penekanan pada keadilan, pengakuan atas pelanggaran HAM, dan penolakan terhadap penggunaan kekerasan seksual sebagai instrumen perang.

Hubungan Diplomatik dengan Jepang

Isu Comfort Women dan sejarah pendudukan Jepang di Korea selama Perang Dunia II menjadi sumber ketegangan utama dalam hubungan bilateral. Pemerintahan Moon Jae-in mengambil sikap yang tegas dalam menangani isu ini, menuntut pengakuan dan permintaan maaf yang lebih jelas dari pemerintah Jepang. Pemerintahan Moon Jae-in meninjau kembali perjanjian bilateral antara Korea Selatan dan Jepang yang ditandatangani pada tahun 2015 terkait isu Comfort Women. Pemerintah Korea Selatan menganggap perjanjian tersebut tidak memadai dan mencoba untuk merundingkan kembali kesepakatan agar lebih mencerminkan keadilan dan kepuasan bagi para korban. Upaya untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah

pihak dalam negosiasi terkait isu Comfort Women belum sepenuhnya berhasil. Perbedaan pendekatan dan pandangan antara Korea Selatan dan Jepang mengenai sejarah dan tanggung jawab atas masa lalu tetap menjadi hambatan. Hubungan diplomatik sempat tegang ketika Korea Selatan meluncurkan kampanye boikot terhadap produk-produk Jepang sebagai respons terhadap ketegangan di bidang ekonomi dan perdagangan. Pemerintahan Moon Jae-in mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak ekonomi dan memitigasi ketegangan. Meskipun ketegangan terus berlanjut di bidang sejarah, terdapat upaya diplomatik untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan regional. Pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin Korea Selatan dan Jepang terus dilakukan, mencoba membangun landasan kerjasama yang lebih luas. Adanya perubahan dalam kabinet pemerintahan Moon Jae-in telah membawa pengaruh terhadap arah diplomasi Korea Selatan. Terdapat upaya untuk membuka babak baru dalam hubungan dengan Jepang, meskipun tantangan yang dihadapi tetap signifikan. Pemerintah Moon Jae-in berupaya meningkatkan diplomasi publik, termasuk melalui dialog dengan masyarakat sipil di kedua negara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman dan dukungan yang lebih baik di tingkat masyarakat. Dalam konteks ketegangan regional, khususnya dengan Korea Utara dan Tiongkok, kerja sama antara Korea Selatan dan Jepang dianggap penting untuk mencapai stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Timur.

Negosiasi antara Korea Selatan dan Jepang

Negosiasi antara Korea Selatan dan Jepang, khususnya terkait isu Comfort Women dan masalah sejarah lainnya, telah menjadi fokus perhatian internasional. Meskipun proses ini memiliki sejumlah hambatan, upaya terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa aspek negosiasi antara Korea Selatan dan Jepang:

1. Pertemuan Tingkat Tinggi:

Pada beberapa kesempatan, kedua negara telah melakukan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas isu-isu sensitif. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi platform untuk membahas perbedaan pandangan, membangun kepercayaan, dan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

2. Negosiasi Bilateral:



Negosiasi secara langsung antara pejabat-pejabat tinggi dari Korea Selatan dan Jepang terus dilakukan. Meskipun terdapat kesulitan dalam mencapai titik temu, dialog terus diperjuangkan sebagai cara untuk menangani perbedaan pandangan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

3. Perubahan Sikap dan Pendekatan:

Terdapat perubahan sikap dan pendekatan dalam negosiasi, terutama seiring berjalananya waktu dan perubahan kepemimpinan di kedua negara. Fleksibilitas dan keterbukaan untuk mengubah pendekatan menjadi kunci dalam merespon dinamika negosiasi.

4. Keterlibatan Pihak Ketiga:

Beberapa upaya melibatkan mediator atau pihak ketiga dalam proses negosiasi telah diusulkan. Mediator dapat membantu meredakan ketegangan, menyediakan pandangan yang netral, dan memfasilitasi perundingan agar lebih efektif.

5. Upaya untuk Merumuskan Kesepakatan Baru:

Pemerintahan Moon Jae-in telah menyatakan niat untuk merumuskan kembali perjanjian bilateral antara Korea Selatan dan Jepang yang terkait dengan isu Comfort Women. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang lebih adil dan memuaskan para korban.

6. Respons Masyarakat Sipil:

Aktivisme dan peran masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam proses negosiasi. Suara masyarakat dapat memengaruhi posisi pemerintah dan membentuk opini publik yang mempengaruhi dinamika negosiasi.

7. Kesulitan dalam Mencapai Kesepakatan Lengkap:

Isu sejarah dan perbedaan pandangan mengenai interpretasi masa lalu menjadi kendala utama dalam mencapai kesepakatan yang komprehensif. Kesulitan menemukan titik temu yang memuaskan semua pihak telah menjadi tantangan utama dalam proses negosiasi.

8. Diplomasi Publik dan Komunikasi:

Diplomasi publik dan komunikasi antar masyarakat sangat penting dalam mengelola perbedaan dan mendukung proses negosiasi. Pengelolaan opini publik dan persepsi masyarakat dapat memengaruhi sikap dan keputusan pemerintah.

Dampak dan Hasil

1. Perkembangan Positif dan Tantangan yang Masih Ada

Dampak Positif :

- a. Kesadaran Internasional: Perkembangan positif termasuk meningkatnya kesadaran internasional terhadap isu Comfort Women melalui upaya diplomasi dan negosiasi. Fokus pada isu ini telah menarik perhatian masyarakat global dan menciptakan tekanan untuk mencari solusi yang adil.
- b. Dialog Terbuka: Meskipun terdapat ketegangan, terjadi pembukaan dialog terbuka antara Korea Selatan dan Jepang. Proses negosiasi membantu menciptakan platform bagi kedua belah pihak untuk berbicara dan mendengarkan, meskipun perbedaan pendapat tetap ada.
- c. Peningkatan Kesejahteraan Korban: Adanya kesepakatan atau upaya meningkatkan hubungan bilateral dapat membawa dampak positif terhadap kesejahteraan korban Comfort Women. Fokus pada dukungan kesehatan, rehabilitasi, dan kompensasi dapat memberikan manfaat langsung bagi mereka.
- d. Rehabilitasi Hubungan Bilateral: Jika berhasil, penyelesaian isu Comfort Women dapat merestorasi dan meresahkan hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang. Ini dapat membuka jalan bagi kerjasama yang lebih baik di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan.

Tantangan yang Masih Ada :

- a. Ketidaksetujuan tentang Sejarah: Perbedaan interpretasi sejarah antara Korea Selatan dan Jepang tetap menjadi hambatan utama. Tantangan dalam mencapai kesepakatan akhir yang dapat diterima oleh kedua belah pihak terkait dengan perbedaan pandangan mengenai peristiwa masa lalu.
- b. Teori Penghukuman: Tantangan dalam penegakan teori penghukuman atau sanksi ekonomi terhadap negara lain sebagai respons terhadap ketegangan bilateral. Meskipun adanya kampanye boikot, efektivitasnya dalam merespons isu Comfort Women masih menjadi perdebatan.



- c. Pengaruh Opini Publik: Opini publik di kedua negara memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan negosiasi. Kesulitan mengubah persepsi masyarakat dan mendapatkan dukungan untuk kesepakatan yang kompromi dapat menjadi tantangan.
- d. Dinamika Politik Internal: Perubahan dalam dinamika politik di Korea Selatan atau Jepang dapat mempengaruhi arah dan keberlanjutan negosiasi. Faktor-faktor internal, seperti perubahan kepemimpinan atau tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, dapat menjadi hambatan.
- e. Keterbukaan Jepang Terhadap Pengakuan: Kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan permintaan maaf yang memadai dari pihak Jepang menjadi salah satu tantangan. Persoalan mengenai sejauh mana Jepang bersedia mengakui tanggung jawab atas peristiwa Comfort Women menjadi poin krusial.
- f. Diplomasi Multilateral: Tantangan dalam melibatkan atau memperoleh dukungan dari negara-negara atau organisasi internasional untuk memberikan dorongan atau mediator dalam proses negosiasi.

2. *Respons Masyarakat dan Opini Publik*

Dampak Positif :

- a. Kesadaran Publik: Negosiasi antara Korea Selatan dan Jepang menciptakan kesadaran publik yang lebih tinggi terhadap isu Comfort Women. Masyarakat menjadi lebih akrab dengan kompleksitas sejarah dan dampaknya, memotivasi perbincangan yang lebih mendalam.
- b. Mobilisasi Dukungan: Upaya negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat memobilisasi dukungan dari sektor masyarakat tertentu, termasuk kelompok advokasi hak asasi manusia, aktivis perempuan, dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu-isu sejarah dan kemanusiaan.
- c. Peningkatan Solidaritas Masyarakat Sipil: Isu Comfort Women dapat memperkuat solidaritas dalam masyarakat sipil, baik di Korea Selatan maupun internasional. Solidaritas ini dapat menjadi pendorong untuk mendukung upaya penyelesaian dan perubahan positif.
- d. Pengaruh Terhadap Politik: Opini publik yang kuat dapat memengaruhi pandangan partai politik dan kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, pandangan masyarakat dapat menciptakan tekanan untuk mengarahkan kebijakan luar negeri dan negosiasi pemerintah.



Tantangan yang Masih Ada :

- a. Fragmentasi Opini Publik: Meskipun ada dukungan yang kuat, opini publik dapat bersifat fragmentatif. Terdapat kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda terkait pendekatan terhadap isu Comfort Women, dan ini dapat menciptakan ketegangan internal di masyarakat.
- b. Sentimen Nasionalis: Isu Comfort Women dapat merangsang sentimen nasionalis yang dapat membuat negosiasi lebih sulit. Kedua pihak mungkin dihadapkan pada tekanan untuk mempertahankan pandangan nasionalis mereka, yang bisa menghambat kemungkinan kesepakatan.
- c. Pengaruh Media: Media dapat memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Tergantung pada sudut pandang media, respons masyarakat bisa berubah, dan pemberitaan yang bersifat bias dapat merumitkan proses negosiasi.
- d. Ketidakpuasan Terhadap Kesepakatan: Meskipun kesepakatan dapat dicapai, tidak semua pihak di masyarakat mungkin puas dengan hasilnya. Beberapa mungkin merasa bahwa penyelesaian tersebut tidak mencukupi atau tidak adil, menciptakan ketidakstabilan dalam opini publik.
- e. Polarisasi Politik: Isu Comfort Women dapat menjadi sumber polarisasi politik di dalam negeri, dengan partai-partai yang bersaing untuk memanfaatkan opini publik dan mencapai tujuan politik mereka sendiri.
- f. Tantangan Masyarakat Internasional: Respon dari masyarakat internasional terhadap perkembangan negosiasi dapat membentuk pandangan dan opini publik di dalam negeri. Tantangan dalam mendapatkan dukungan global atau mengatasi tekanan dari komunitas internasional bisa menjadi hal yang sulit.

KESIMPULAN

Dalam era pemerintahan Moon Jae-in, diplomasi dan negosiasi Korea Selatan terkait isu Comfort Women menjadi pusat perhatian yang memperlihatkan beberapa dinamika dan perubahan signifikan. Pemerintahan Moon Jae-in mengusung pendekatan proaktif terhadap isu Comfort Women dengan menegaskan pengakuan dan permintaan maaf, serta berupaya merumuskan kembali perjanjian bilateral yang dianggap kurang memadai. Terjadi perubahan dalam pendekatan diplomasi Korea Selatan, di mana pemerintahan Moon Jae-in lebih terbuka untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan melalui dialog dan negosiasi dengan Jepang.



Fokus pada peningkatan dukungan kesejahteraan bagi para korban Comfort Women mencerminkan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap penderitaan yang dialami oleh wanita-wanita tersebut. Respons positif dari masyarakat sipil, termasuk kelompok aktivis dan organisasi hak asasi manusia, telah memberikan dorongan tambahan bagi pemerintah untuk terus mengejar penyelesaian yang memadai. Tantangan utama tetap ada dalam mencapai kesepakatan komprehensif dengan Jepang, terutama dalam hal perbedaan pandangan mengenai sejarah dan respons terhadap isu Comfort Women. Korea Selatan menunjukkan komitmen pada diplomasi multilateral dengan memobilisasi dukungan dari masyarakat internasional untuk mendukung tuntutannya terhadap Jepang.

Kesempatan untuk merehabilitasi hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang melalui penyelesaian isu Comfort Women menjadi fokus utama, dengan harapan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat membuka pintu bagi kerjasama lebih lanjut. Kesimpulan tersebut mencerminkan bahwa pemerintahan Moon Jae-in berupaya menghadapi isu Comfort Women dengan pendekatan yang lebih terbuka dan berorientasi pada penyelesaian, sambil tetap mengakui kompleksitas diplomasi dalam menanggapi tantangan sejarah. Proses negosiasi ini merupakan langkah penting untuk membentuk kembali hubungan bilateral dan memberikan keadilan kepada para korban.

REKOMENDASI UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terkait isu Comfort Women dan upaya diplomasi serta negosiasi Korea Selatan pada era pemerintahan Moon Jae-in:

Analisis Mendalam tentang Dampak Kesejahteraan:

Penelitian dapat difokuskan pada dampak nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan korban Comfort Women. Melibatkan studi kasus, wawancara, dan survei dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas program dukungan dan kebutuhan aktual para korban.

Studi Perbandingan dengan Negara Lain:



Melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang menghadapi isu serupa dapat memberikan wawasan tentang strategi diplomasi dan penyelesaian yang berhasil atau gagal. Analisis lintas negara dapat mengidentifikasi pola-pola umum dan solusi yang dapat diadaptasi.

Analisis Terhadap Respons Internasional:

Fokus penelitian dapat diarahkan pada bagaimana respons internasional memengaruhi dinamika negosiasi antara Korea Selatan dan Jepang. Melibatkan analisis terhadap peran pihak ketiga, lembaga internasional, dan dampak diplomasi multilateral pada penyelesaian isu Comfort Women.

Kajian Terhadap Pengaruh Opini Publik:

Penelitian dapat menginvestigasi lebih lanjut bagaimana opini publik di Korea Selatan dan Jepang memengaruhi sikap pemerintah dan kemungkinan kesepakatan. Analisis terhadap peran media, kelompok advokasi, dan pola perubahan opini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik.

Dinamika Politik dan Diplomasi Internal:

Kajian dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor internal seperti perubahan dalam dinamika politik, pergeseran kebijakan, dan kekuatan politik di masing-masing negara dapat memengaruhi strategi diplomasi terkait isu Comfort Women.

Pengaruh Kabinet dan Kepemimpinan:

Melibatkan penelitian tentang dampak perubahan dalam kabinet dan kepemimpinan terhadap arah diplomasi Korea Selatan. Bagaimana kebijakan dan pendekatan berubah seiring waktu dan bagaimana itu memengaruhi perundingan dengan Jepang.

Peran Masyarakat Sipil dan Aktivis:

Studi mendalam tentang peran masyarakat sipil dan aktivis dalam mendorong perubahan kebijakan dan membentuk opini publik. Bagaimana partisipasi masyarakat sipil mempengaruhi pilihan kebijakan pemerintah dan proses diplomasi.

Aspek Hukum dan Perjanjian Internasional:

Penelitian dapat menggali lebih dalam aspek hukum yang terlibat dalam penyelesaian isu Comfort Women, termasuk relevansi dan efektivitas perjanjian bilateral, serta implikasi hukum internasional yang terkait.



Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang upaya penyelesaian isu Comfort Women, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait strategi diplomasi dan negosiasi yang dapat diterapkan dalam konteks sejarah yang sensitif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini Nurlisa Putri Sawaki, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliartini. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN (STUDI KASUS PELANGGARAN HAM SISTEM COMFORT WOMEN). *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia Volume 1 Nomor 2*, 183-187.
- ANP Sawaki. (2023). pelanggaran HAM sistem Comfort Women di masa lalu. *repo undiksha*, 1-8.
- AP, B. (2020, Desember 3). *Berlin district to keep 'comfort women' statue for now*. Retrieved from apnews: <https://apnews.com/general-news-international-news-ef848ed764b304f3062b7633aa719720>
- BBC. (2017, November 23). *San Francisco accepts 'comfort women' statue*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-42092477>
- Min, P. G. (2003). “*Comfort Women*”: The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class. Korean: Gender and Society.
- Qiu, P., Su, Z, & Chen, L. (2013). *Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan’s Sex Slaves*. New York: Oxford University Express.
- Rossi Indrakorniawan, Ghifarul Madilla, Kanugrahayuning Bethari, & Ajeng Kenya. (2023). UPAYA DIPLOMASI JEPANG DALAM MENYELESAIKAN ISU COMFORT WOMEN DI KOREA SELATAN. *Jurnal Pena Wimaya Vol. 3 No. 1*, 8-17.
- Rosyidin, M. (2019). *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Tanaka, Y. (2018). *Hidden Horrors : Japanese War Crimes in World War II*. New York: Routledge.
- Willa Wahyuni. (2022, Maret 16). *Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik*. Retrieved from hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/>

